

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Yusuf Zainal. (2016). *Komunikasi Pemerintahan : Filosofi, Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- David, Iyanda. (2012). Corruption: Definitions, Theories And Concepts. *Arabian Journal of Business and Management Review, Volume 2 No.4 Nov 2012, p37-45*
- Fatkhuri. (2017). Korupsi Dalam Birokrasi dan Strategi Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial, Vol. 1 No. 2 Tahun 2017, hlm 65-76*
- Goldhaber, Gerald M. (1993). *Organizational Communication 6th Edition*. New York: McGraw Hill.
- Griffin, Em. (2003). *A First Look at Communication Theory Sixth Edition*. New York: McGraw Hill.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media
- Harivarman, Dwi. (2017). Hambatan Komunikasi Internal di Organisasi Pemerintahan. *Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 3, Juli 2017, hlm 509-518*
- Hasan, Erliana. (2014). *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama
- Linke, Anne & Ansgar Zerfass. (2011). Internal communication and innovation culture: developing a change framework, *Journal of Communication Management, Vol. 15 Iss 4 pp. 332 - 348*
- Littlejohn, S. W. & Karen A. Foss. (2008). *Theories of Human Communication, Ninth Edition*. Belmont, California: Thomson Wadsworth

- Miles, B. Mathew & A. Michael Huberman. (1994). *Qualitative Data Analysis Second Edition*. California: SAGE Publications.
- Mosepa, A., Rahman, A.A. & Rozarius, F. (2018). Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang. *Jurnal Hukum Peratun, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2018 : 183 - 202*
- Muhammad, Arni. (2017). *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mulyana, Deddy. (2010). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Cetakan XIV*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nowkorie, Ethelbert C. (2018). Effects of Corruption on Managers Communication and Networking Behaviours: Implications for Nigeria and Ghanaian Public Sector Effectiveness. *International Journal of Managerial Studies and Research, Volume 6, PP 51-63*
- Pace, Wayne R. & Don F. Faules. (2001). *Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pujileksono, Sugeng. (2016). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Intrans Publishing.
- Soyomukti, Nurani. (2016). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Ar-ruz Media
- Suwitri, Sri. (2007). Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, Volume 4 Nomor 1, Januari 2007, hlm 23-41*
- Waluyo, Bambang. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2, Desember 2014, hlm 169 - 182*
- Weick, Karl. (1995). *Sensemaking in Organization*. Thousand Oaks, CA: Sage Publication
- West, Richard & Lynn H. Turner. (2017). *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi* diterjemahkan oleh Harya Bimasena, Gisella Tani Pratiwi. Jakarta: Salemba Humanika.

Winarno, Budi. (2014). *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: Center Of Academic Publising Service.

Yin, Robert K. (2012). *Studi Kasus: Desain & Metode*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

## **Peraturan**

Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi

Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Keputusan Menteri Keuangan nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Keuangan

## **Artikel Online**

- Kementerian Keuangan. (2017). 18 Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) jadi Role Model Nasional, Diakses pada tanggal 18 Februari 2019, dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/18-wilayah-birokrasi-bersih-dan-melayani-wbbm-jadi-role-model-nasional/>
- Kementerian PAN RB. (2018). Semangat Reformasi Birokrasi Makin Mengakar, 1000 Unit Kerja Ajukan WBK/WBBM. Diakses tanggal 18 Februari 2019, dari <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/semangat-reformasi-birokrasi-makin-mengakar-1000-unit-kerja-ajukan-wbk-wbbm>
- Kompas.com. (2018). Ketua KPK: Pertumbuhan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tertinggi di Dunia. Diakses tanggal 15 Februari 2019, dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/04/10400111/ketua-kpk-pertumbuhan-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tertinggi-di-dunia>
- Indonesia Corruption Watch. (2018). Laporan Tahunan tentang Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018 Diakses tanggal 6 April 2019, dari <https://antikorupsi.org/id/tren/tren-penindakan-kasus-korupsi-2018>
- Transparency International. (n.d). What is Corruption ?. Diakses tanggal 14 Maret 2019, dari <https://www.transparency.org/what-is-corruption#define>
- We Are Social. (2019). Digital 2019: Global Internet Use Accelerate. Diakses tanggal 14 Maret 2019, dari <https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates>